

**KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ATAS OPINI  
YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN  
Pemeriksa Keuangan**

**SKRIPSI**



**Nama : Halima Tusa'Diyah  
NIM : 22 2012 040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2016**

**KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN ATAS OPINI  
YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN  
PEMERIKSA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Halima Tusa'Diyah  
NIM : 22 2012 040**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halima Tusa'Diyah

NIM : 22 2012 040

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 05 Maret 2016

Penulis



*Halima TD*

Halima Tusa'Diyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah  
Provinsi Sumatera Selatan atas Opini Yang  
Dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan  
Nama : Halima Tusa'Diyah  
NIM : 22 2012 040  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi  
Kosentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal 05 Maret 2016

Pembimbing



**DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si**

**NIDN/NBM: 0002095507/972321**

Mengetahui.

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si**

**NIDN/NBM: 0228115802/1021961**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“Kerja keras dan usaha tidak akan pernah berkhianat atas hasil yang akan dicapai.”**

**“Usaha dan doa selalu sebanding dengan hasil.”**

**(Halima)**

### **Kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tuaku  
Bapak Latif dan Ibu Anik**
- 2. Saudari - saudariku yang tecinta  
Mba Dewi, Mba Ari dan Adik Wulan**
- 3. Pembimbing Skripsiku  
Ibu Sa'adah Siddik yang memberikan  
kekuatan dan keyakinan untuk terus  
maju**
- 4. Almamaterku**

## PRAKATA



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas Opini yang Dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut harus memeberikan kualitas informasi dalam penyajiannya. Diketahui bahwa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan telah dibuat berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Hal ini dapat dilihat dari pemberian opini yang dikeluarkan oleh badan pemeriksa keuangan atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan. Opini yang diberikan meningkat dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kualitas informasi laporan keuangan atas opini yang telah diberikan. Adapun penulisan laporan penelitiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada mendiang Ayahku tercinta (H. A latif) dan Ibuku yang sangat kusayangi (Hj Anik Khutsiyah) yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu DR. Sa'adah Siddik, SE., Ak., M.Si yang telah memberikan semangat besar, bimbingan, ilmu, dan juga pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Ibu Rosalina Ghozali , S.E., Ak., M.Si dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Fenty, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya selama ini
6. Bapak Kurniawan selaku Kasubag SDM kantor BPK perwakilan RI serta staf kantor yang telah bersedia untuk membantu dalam pengambilan data penelitian.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha yang telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun Demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Amin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 05 Maret 2016

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PRAKATA</b> .....	vi
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori .....	12

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	25
D. Data yang Diperlukan .....	25
E. Metode Pengumpulan Data.....	26
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	27
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>29</b>
A. Hasil Penelitian .....	29
1. Sejarah singkat .....	29
2. Visi dan Misi .....	30
3. Struktur Organisasi.....	32
4. Tugas dan Tanggungjawab.....	33
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	35
1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan.....	35
2. Opini pemeriksa laporan keuangan .....	38
 <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>79</b>
A. Simpulan.....	79
B. Saran .....	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Dftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014.....	4
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	11
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	25
Tabel IV.1 Temuan Kelemahan Yang Tidak Dapat Diverifikasi .....	36
Tabel IV.2 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Sumatera Selatan tahun 2012.....	39
Tabel IV.3 Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 .....	41
Tabel IV.4 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 .....	44
Tabel IV.5 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Sumatera Selatan tahun 2013.....	48
Tabel IV.6 Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 .....	50
Tabel IV.7 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 .....	53
Tabel IV.8 Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 .....	60
Tabel IV.9 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Keuangan Pemprov Sumsel.....	73
Lampiran 2. Surat Pernyataan Selesai Melakukan Penelitian.....	94
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	95
Lampiran 4. Fotocopy Aktivitas Bimbingan Penulisan Skripsi.....	96
Lampiran 5. Fotocopy Sertifikat Hafalan Membaca Surat-surat Pendek Al-qur'an .....	97
Lampiran 6. Fotocopy Sertifikat TOEFL .....	98
Lampiran 7. Biodata Penulis .....	99

## Abstrak

### **Halima Tusa'Diyah/222012040/2016/Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas Opini yang Dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah atas opini yang dikeluarkan oleh BPK.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan daerah provinsi Sumatera Selatan dan opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Data yang digunakan yaitu data sekunder yaitu laporan hasil pemeriksaan tahun 2012 sampai dengan 2014. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat telah sesuai dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan, kemudian juga dalam penyusunan laporan keuangan daerah pemprov Sumsel memenuhi karakteristik yang merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, sehingga opini yang didapatkan pemprov Sumsel atas pemeriksaan LKPD meningkat dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan.

Kata Kunci: kualitas informasi laporan keuangan, opini.

*Abstrac*

*Halima Tusa'Diyah/222012040/2016/ The Quality Of Financial Reporting Information South Sumatra Provincial Government On Opinions Issued By The BPK*

*Formulation of the problem in this research is how the quality of financial reporting information South Sumatra provincial government on opinions issued by the BPK. The aim of research to identify and explain the quality of local government financial statement information on opinions issued by the BPK.*

*This research was descriptive for the presence of independent variables either only one or more variable. Variable in this study is the quality of financial reporting information of the provinces of South Sumatra and opinions issued by the BPK. The data used are secondary data examination reports in 2012 through 2014.*

*The analysis technique used is qualitative. The analysis showed that the financial statements are prepared in accordance and following government accounting standards and local regulations that have been set, and then also in the preparation of financial statements of local provincial government of South Sumatra meet the characteristics of which is the condition of normative necessary for the financial statements to meet the desired quality, so opinions South Sumatra provincial government obtained the inspection LKPD increase of the fair with the exception being unqualified with an explanatory paragraph.*

*Keywords: the quality of financial reporting information, audit opinion.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada stakeholder atau para pengguna laporan keuangan.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut harus memberikan kualitas informasi dalam penyajiannya. Kualitas Informasi laporan keuangan yaitu sejauh mana



informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bernilai kalau informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan, dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga informasi akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Menurut Mursyidi (2009: 43) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian dalam menyusun laporan keuangan harus menyajikan kualitas informasi yang terkandung di dalamnya, untuk itu laporan keuangan yang disusun harus memenuhi suatu standar dan kriteria yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Deddi dkk (2007: 131) agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut:

- a. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mereka mengevaluasi masa lalu atau masa kini. selain itu, suatu informasi dikatakan relevan jika disajikan secara tepat waktu dan lengkap.
- b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- d. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi ukuran-ukuran normatif dan kriteria karakteristik kualitatif maka laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya serta telah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Kualitas laporan keuangan yang baik juga tercermin dari semakin tingginya tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jika tingkat

pengungkapan tinggi maka probabilitas opini audit yang diperoleh kementerian/lembaga menjadi semakin baik, hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu indikator dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan mendorong Kementerian/Lembaga/Dinas untuk memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) setiap tahunnya. Berdasarkan Ikhtisar Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II BPK opini yang dikeluarkan oleh BPK tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 untuk Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kemudian pada tahun 2014 barulah mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjelasan. Opini WTP-DPP ini bukan merupakan suatu hasil yang maksimal serta mengindikasikan bahwa masih banyak kelemahan dalam laporan keuangan daerah yang harus diperbaiki.

Tabel I.1  
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2012 Sampai dengan Tahun 2014

Tahun Opini	Keterangan Opini
2012	Wajar dengan pengecualian (WDP)
2013	Wajar dengan pengecualian (WDP)
2014	Wajar tanpa pengecualian- dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Opini wajar dengan pengecualian diperoleh pada tahun 2012 karena aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, kemudian penyertaan modal yang belum ditetapkan dalam

peraturan daerah. Opini wajar dengan pengecualian diperoleh pada tahun 2013 karena saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai serta pelaksanaan belanja modal dan belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, umumnya opini ini diperoleh karena laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material akan tetapi masih terdapat temuan yang berpotensi kerugian daerah.

Menurut Mahmudi (2011) Pemberian opini didasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan dinyatakan dalam sejumlah temuan kelemahan SPI. Semakin banyak jumlah temuan menunjukkan semakin lemah sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan sistem pengendalian intern terdiri atas kelemahan akuntansi pelaporan, kelemahan pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian.

Dengan melihat segala kondisi di atas maka suatu Instansi Pemerintah Daerah yang ingin mencapai opini WTP harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kegiatan

Pemerintahannya. Penerapan SPIP menjadi salah satu faktor untuk menentukan opini yang akan diberikan oleh BPK. Namun hingga saat ini masih banyak Pemerintah Daerah yang menghadapi kendala dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintahan mereka. Terbukti dengan berfluktuasinya jumlah kasus SPI hasil dari temuan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu pada tahun 2012 terdapat tujuh kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, lima kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

Pada tahun 2013 terdapat temuan lima kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sembilan kasus temuan kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan lima kasus kelemahan sistem pengendalian intern. Pada tahun 2014 terdapat enam kasus temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, empat kasus temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja, empat kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Terdapatnya hasil temuan sejumlah kelemahan Sistem pengendalian intern mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi kerugian daerah oleh karena itu pemerintah daerah harus segera membenarkan SPIP dalam pemerintahannya untuk mengurangi potensi kerugian daerah tersebut terjadi. Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul kualitas

informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

### **a. Bagi penulis**

Sebagai bukti empiris yang ada tentang kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Bagi Instansi Dinas

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi pertimbangan bagi instansi yang terkait untuk menjadi bahan acuan dalam menyusun dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan.

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi refrensi tambahan bagi ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **a) Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Dyah dan Bestari (2015) berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah salah tiga. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Akhmad dan Dwi (2014) yang berjudul pengaruh kesejahteraan masyarakat, faktor politik dan ketidakpatuhan regulasi terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kesejahteraan masyarakat, faktor politik dan ketidakpatuhan regulasi terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu



*purposive sampling*, dengan jumlah responden 60 orang. sumber data yang digunakan data primer, data digunakan dengan metode survey. metode analisis data yang digunakan yaitu analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan opini audit atas LKPD BPK secara keseluruhan dalam periode 2009-2011 mengalami peningkatan. Persentase opini wajar tanpa pengecualian (WTP) mengalami peningkatan dari hanya 2 % pada tahun 2009 menjadi 12% pada 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah semakin baik. Berdasarkan hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel terkait peranan masyarakat madani memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap opini audit maupun peningkatan opini audit. Variabel yang berpengaruh tersebut adalah tingkat pembangunan manusia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi (2012) yang berjudul *good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam melihat apakah *good governance* dapat dinilai dari segi kualitas laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh BPK. Apa penyebab masih jeleknya tata kelola keuangan pemerintah. Analisis menggunakan data-data opini yang dikeluarkan auditor atas laporan keuangan pemerintah dan hasil-hasil analisis penelitian sebelumnya beserta argumen-argumen para ahli. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa *good governance* bisa dinilai dengan melihat pada kualitas

laporan keuangan pemerintah yang diukur dari opini auditor. Sedangkan masih jeleknya tata kelola keuangan pemerintah karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di pemerintahan serta penerapan standar akuntansi pemerintahan yang belum maksimal.

Tabel II.1  
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Dyah dan Bestari (2015)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah Tiga	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder	Perbedaannya yaitu terletak pada variabel penelitian dan tempat objek dilakukan penelitian
Akhmad dan Dwi (2014)	Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Data yang digunakan dalam penelitian adalah data skunder.	Tempat objek penelitian dan perbedaan variabel penelitian
Desi (2012)	Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Data yang digunakan dalam penelitian adalah data skunder.	Menambah variabel dari penelitian sebelumnya dan menghilangkan variabel good governance. Tempat penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu

Sumber: Penulis, 2015

## **b) Landasan Teori**

### **1) Laporan Keuangan**

Menurut Mursyidi (2009: 59) laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis, mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Menurut Deddi dkk (2007: 151) laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan entitas lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Menurut Sofyan (2012: 205) laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Mardiasmo (2009: 159) akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi keuangan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

## **2) Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Mursyidi (2009: 47) ada empat karakteristik yang merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki:

- a. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau

masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi dalam laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi relevan:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
  - 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - 3) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - 4) Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan secara jelas agar kekeliruan dalam informasi dapat dicegah.
- b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan . Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - 3) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- c. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan dapat dilakukan bila pemerintah menetapkan kebijakan yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan dapat dilakukan secara eksternal bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah ingin menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
- d. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan keuangan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Sofyan (2012: 127-128) kualitas laporan keuangan yang baik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Relevan

Memilih informasi yang benar-benar sesuai dapat membantu pemakai laporan dalam mengambil keputusan.

b) Dapat dipahami

Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tapi juga informasi yang dimengerti para pemakainya.

c) Dapat diperiksa

Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

d) Netral

Laporan keuangan itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi dimaksud untuk pihak umum bukan pihak tertentu saja.

e) Tepat waktu

Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat.

f) Dapat dibandingkan

Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

g) Lengkap

Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan yang layak dari para pemakai.

### 3) Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Bahtiar dkk (2009: 147) Standar akuntansi pemerintahan adalah standar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBN dan APBD.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain itu juga harus menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi (Mahmudi, 2011: 209). Kemudian menurut Indra (2006: 123) Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi merupakan bagian dari prinsip akuntansi



berterima umum. Menurut Mahmudi (2011: 103) Standar akuntansi memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi manajemen, standar akuntansi menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
2. Bagi auditor, standar akuntansi menjadi kriteria audit sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
3. Bagi pengguna laporan keuangan, standar akuntansi dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami laporan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan salah interpretasi
4. Bagi organisasi, standar akuntansi dapat meningkatkan konsistensi, keterbandingan laporan keuangan antar periode dan dengan organisasi lain yang sejenis, relevansi dan reliabilitas sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **4) Sistem Pengendalian Intern**

Menurut PP No 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan pengendalian

terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan organisasi.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan (Mahmudi, 2011: 251). Sebuah sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya (Arens, dkk, 2013: 316). Salah satu tujuan sistem pengendalian intern adalah untuk mendapatkan keandalan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas, selain itu menurut Mahmudi (2011: 252) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal adalah untuk:

1. Melindungi aset negara baik fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental responsif atas kasus tertentu saja tapi bersifat terus menerus. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan memadai, bukan jaminan absolut karena sangat sulit dan mahal untuk membangun sistem yang sempurna. Sistem pengendalian itu sendiri masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga memungkinkan untuk diterobos, dilanggar dan dilakukan kesalahan. Sistem pengendalian bukan sesuatu yang final, tetapi harus selalu diriviu, diuji, dikembangkan dan diperbaiki.

Elemen sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 terdiri atas lima unsur yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian, merupakan elemen yang penting yang melandasi unsur lainnya dalam sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi
- b. Penilaian risiko, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam

- c. Kegiatan pengendalian, membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan. kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi
- d. Informasi dan komunikasi , manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik
- e. Pemantauan, harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

## 5) Opini Audit

Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat opini auditor. Menurut Mahmudi (2011: 315) opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*)

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian internal

Menurut Mulyadi (2002: 20-22) terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa atau auditor terhadap pemeriksaan laporan keuangan yaitu:

1. Wajar tanpa pengecualian (WTP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
2. Wajar dengan pengecualian (WDP), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang berhubungan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Tidak wajar (TW), memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
4. Pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP), menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Menurut Mahmudi (2011: 315-316) terdapat lima jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP), pendapat wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang paling tinggi dilihat dari kualitas laporan yang disajikan. Artinya laporan keuangan yang

disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) yang dilaporkan, tidak terdapat salah saji material dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi atau prinsip akuntansi.

2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP), pendapat ini masih dalam kategori wajar tanpa pengecualian, hanya untuk pos (akun) tertentu perlu penyesuaian agar menjadi wajar.
3. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), pendapat wajar dengan pengecualian menunjukkan bahwa sebagian besar pos dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi, namun untuk pos-pos tertentu disajikan tidak wajar.
4. Opini tidak wajar (TW), pendapat tidak wajar diberikan apabila pos-pos dalam laporan keuangan nyata-nyata terdapat salah saji yang material dan tidak sesuai dengan standar akuntansi. keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada.
5. Opini tidak memberikan pendapat, keadaan menolak memberikan pendapat diberikan auditor karena beberapa faktor yaitu: a) auditor terganggu indenpedensinya, b) auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2009: 53-55), jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

##### **1. Penelitian Deskriptif**

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

##### **2. Penelitian Komparatif**

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

##### **3. Penelitian Asosiatif**

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan Provinsi Sumatera Selatan dan opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## B. Lokasi Penelitian

Pada Instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl Demang Lebar Daun No. 2 Telpon (0711) 410549 Faximail (0711) 358948 Palembang Sumatera Selatan.

## C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses pengambilan keputusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan</li> <li>2. Andal</li> <li>3. Dapat dibandingkan</li> <li>4. Dapat dipahami</li> </ol>
Opini Pemeriksa Laporan Keuangan	Pendapat yang diberikan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajar tanpa Syarat (WTP)</li> <li>2. Wajar dengan syarat (WDP)</li> <li>3. Tidak wajar (TW)</li> <li>4. Tidak memberikan pendapat (TMP)</li> </ol>

Sumber: Penulis, 2015

## D. Data yang Diperlukan

Menurut Husein (2011: 42) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:



### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel- tabel atau diagram- diagram.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui laporan hasil pemeriksaan oleh BPK Provinsi Sumsel atas Laporan Keuangan Daerah Sumatera Selatan.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

### 1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

## 2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

## 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

## 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi dengan mengumpulkan laporan hasil pemeriksaan LKPD Provinsi Sumsel tahun 2012 sampai dengan 2014.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Menurut Mudrajad (2009: 145) analisis data terdiri dari 2 jenis, yaitu:

a) Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan teknis analisis dengan cara menganalisis data yang bukan berupa angka-angka atau data yang tidak diukur dengan skala numerik.

b) Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah teknis analisis dengan cara menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka perhitungan.

Dalam penelitian ini analisis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif, yaitu menganalisis data yang bukan berupa angka dalam penelitian ini menganalisis data laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan.

## **2. Teknik Analisis**

Teknik analisis kualitatif yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk angka, kemudian data tersebut dianalisis dan dijelaskan menggunakan kalimat mengenai laporan ikhtisar hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Analisis data tersebut merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Menurut sumber antropologi disebutkan bahwa asal usul manusia Sumatera bagian selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa Bengamas lereng utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa Padang Bidu atau daerah Podok

Salabe serta penemuan di Kalianda dan Kedaton dimana dapat ditemui tradisi yang berasal dari aceulean yang bermigrasi melalui sungai Mekong yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten / Kota tersebut sebagai berikut :

1. Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja)
2. Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura)

3. Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua)
4. Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung)
5. Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim)
6. Kab. Lahat ( Ibukota Lahat)
7. Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau)
8. Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu)
9. Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai)
10. Kab. Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya)
11. Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
12. Kota Palembang ( Ibukota Palembang)
13. Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam)
14. Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau)
15. Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih)
16. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ( Ibukota Talang Ubi))
17. Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit)

Jumlah agama yang menjadi bahasan ini hanya meliputi 5 agama yaitu : Islam, Khatolik, Kristen, Budha dan Hindu. Di tahun 2003 persentase pengikut agama Islam sebesar 95,16 persen, Budha 1,53 persen, Khatolik 1,29 persen, Kristen 1,16 persen dan Hindu 0,86 persen. Hubungan sosial terutama di dasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan.

Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan.

Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 343. Dan Jumlah kecamatan sebanyak 149 buah. Dengan jumlah penduduk sekitar 6,7 juta jiwa (3,29 %). Untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat setiap aparat pemerintahan Sumatera Selatan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Ciri khas dari pemerintah seperti ini adalah efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan *accountable* dengan indikasi terjalin satu sama lain.

## **2. Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

- **Visi**

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2008-2013; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2013-2018; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; serta

memperhatikan tujuan pembangunan millenium, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah :  
**“Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional”**

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 sebagai berikut:

- **Sejahtera** mengarah kepada kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Selatan pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan dasar, dan sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha. Hidup sejahtera adalah hidup dalam kelimpahan yang tidak hanya keduniawian, tetapi mampu menempatkan, memanfaatkan dan mengarahkan ke duniawian tersebut menjadi sarana hidup masyarakat yang damai, penuh toleransi, saling mendukung, tertib, disiplin dan profesional yang didukung dengan sumberdaya manusia yang bermutu, handal dan profesional.
- **Lebih maju** adalah keadaan Sumatera Selatan yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial. Kemajuan daerah ditandai oleh tingkat kenyamanan, kelancaran dan kemudahan mobilitas orang, barang dan jasa baik untuk kepentingan material



maupun spiritual. Sumatera Selatan yang lebih maju juga berarti kondisi daerah yang memiliki infrastruktur ekonomi yang baik, lengkap dan terpadu.

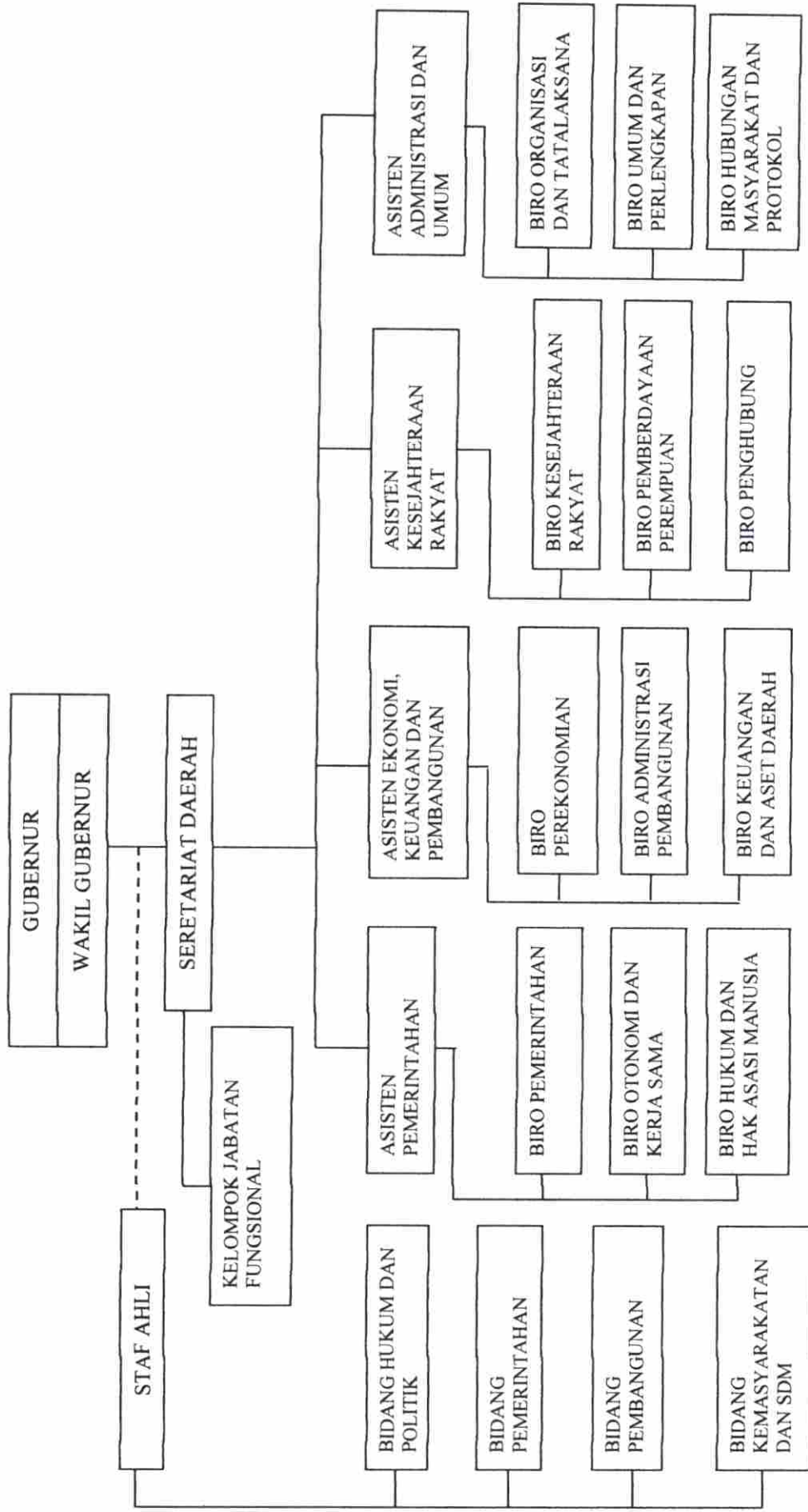
➤ **Berdaya Saing Internasional** menggambarkan kapasitas dan kapabilitas daerah Sumatera Selatan yang berperanserta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama dan hubungan internasional. Penetrasi yang dilakukan dalam berbagai kesempatan kegiatan skala internasional akan menghadirkan daerah Sumatera Selatan yang menarik untuk menjadi tujuan investasi di berbagai bidang. Terkandung di dalamnya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah Sumatera Selatan yang berlimpah, yang masih harus dimanfaatkan secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan demi kemakmuran daerah dan kemaslatan masyarakat.

- **Misi**

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Memantapkan stabilitas daerah;
3. Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

### 3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi karakteristik sebagai berikut:

#### **a. Relevan**

Laporan keuangan daerah provinsi Sumatera Selatan dikatakan relevan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan pokok yaitu laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas yang menampilkan uraian tentang anggaran yang ditetapkan pada tahun yang berjalan dan realisasi yang tercapai pada tahun yang sama serta realisasi yang tercapai pada tahun lalu dapat dilihat pada lampiran 1.

Pengguna laporan keuangan tersebut dapat melihat realisasi yang tercapai pada tahun yang berjalan dan realisasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, sehingga mereka dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai, dan dapat membuat keputusan atau perencanaan keuangan yang akan dicapai pada tahun yang akan datang dengan melihat informasi dari laporan keuangan tersebut.

#### **b. Andal**

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Pada laporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 sampai dengan 2014 yang telah diperiksa oleh Badan

Pemeriksa Keuangan terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak dapat diverifikasi dan tidak diyakini kewajarannya yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.1  
Temuan Kelemahan Yang Tidak Dapat Diverifikasi  
Dan Diyakini Kewajarannya (Dalam Rupiah)

Keterangan	2012	2013	2014
Piutang pajak kendaraan bermotor	116.068.765.625	110.376.638.550	513.284.045.745
Penyajian piutang dan hutang Jamsoskes	19.407.624.162	48.740.943.257	-
Pencatatan nilai investasi non permanen hewan ternak	11.072.640.000	4.241.700.000	4.079.100.000

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Tabel di atas menjelaskan bahwa pemeriksaan pada tahun 2012 sampai dengan 2014 terdapat temuan sejenis yang masih belum dapat diperbaiki oleh pemprov Sumatera Selatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tersebut belum cukup memenuhi kriteria andal.

c. Dapat dibandingkan

Pada laporan keuangan pemprov Sumsel telah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya karena dalam penyusunan laporan keuangan tersebut mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Dapat dipahami

Laporan keuangan Pemprov Sumsel juga telah memenuhi karakteristik dapat dipahami, hal ini dapat dilihat dari penyajian catatan atas laporan keuangan yang menginformasikan dan menjelaskan pos-pos akun yang terdapat dilaporan keuangan secara lebih detail agar dapat dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan yang lain dapat dilihat pada lampiran 1.

Jika melihat dari laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, dalam penyusunan laporan keuangan daerah telah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif yang merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki sehingga dapat memenuhi tujuannya. Setelah diadakannya pemeriksaan oleh BPK, BPK masih menemukan adanya kelemahan-kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengindikasikan potensi kerugian negara. Adanya temuan kelemahan tersebut membuat opini yang didapatkan LKPD pemprov Sumsel adalah WDP untuk tahun 2012 dan 2013, WTP-DPP untuk tahun 2014.

## **2. Opini pemeriksa laporan keuangan**

### **a. Opini Wajar dengan Pengecualian tahun 2012**

#### **1) Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sumsel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya. BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 desember 2012 dan 2011 dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemprov Sumatera Selatan, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 terdapat temuan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) seperti yang dapat dilihat pada tabel IV.2 :

Tabel IV.2  
 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Sumatera Selatan  
 Tahun 2012 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Dana belanja realisasi hibah yang tidak sesuai ketentuan	a. Tidak diketahui alamat penerimanya sebesar 1.275.000.000 b. Tidak sesuai peruntukannya sebesar 606.279.000 c. Lembaga penerima hibah tidak terdaftar di Badan Kesbangpol dan tidak memiliki kesekretariat tetap sebesar 3.045.000.000 d. Belum didukung bukti lengkap sebesar 9.940.796.455 e. Digunakan untuk membayar kegiatan tahun 2011 sebesar 659.359.545
2. Belanja modal	a. Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan sebesar 1.017.181.536.526
3. Piutang pajak kendaraan bermotor	a. Tidak didukung rincian yang dapat diyakini kewajarannya karena terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan sebesar 116.068.765.625 b. Terdapat selisih nilai piutang pajak kendaraan bermotor dalam laporan Dipenda dan program aplikasi samsat pada 15 UPTD sebesar 45.460.439.496
4. Investasi non permanen hewan ternak	a. Tidak disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar 11.072.640.000. Perhitungan dan data yang tersaji tidak dapat diyakini karena terdapat perbedaan antara data rekapitulasi perkembangan hewan ternak sapi dan kambing, perhitungan mutasi, dan rincian pendukungnya. Hal ini karena tidak adanya proses pemantauan dan pelaporan yang memadai atas mekanisme pengolahan hewan ternak.

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku I tahun 2012

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian belanja hibah yang pertanggungjawabannya tidak sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan pembayaran belanja modal yang melebihi prestasi, piutang pajak, piutang lain-lain, dan hutang jamsoskes, dan investasi non permanen, laporan keuangan Pemprov Sumsel menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, realisasi anggaran, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tanggal 31 desember 2012, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **2) Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Permprov Sumsel**

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan



keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan BPK, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3  
 Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan  
 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
 Tahun 2012 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Penempatan deposito berjangka	Penempatan depositoberjangka satu sampai dengan tiga bulan tidak menggunakan SP2D non anggaran sebesar 150.000.000.000
2. Piutang pajak kendaraan bermotor	Piutang disajikan dalam neraca sebesar 116.068.765.625 tidak dapat diyakini kewajarannya
3. Penyajian piutang dan hutang jamsoskes	Penyajian piutang dan hutang dalam neraca masing-masing sebesar 15.875.523.569 dan 3.532.100.593 tidak dapat diyakini kewajarannya
4. Penyajian nilai investasi non permanen	Penyajian nilai investasi non permanen hewan ternak bergulir tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar 11.072.640.000
5. Pengelolaan penerimaan atas retribusi analisa limbah	Pengelolaan penerimaan atas retribusi analisa limbah dilaksanakan dengan tidak tertib dan penerimaan terlambat disetor ke kas daerah sebesar 938.061.999

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku II tahun 2012

Berdasarkan temuan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

- a) Memerintahkan Kepala BPKAD untuk meningkatkan pengendalian pengelolaan kas;
- b) Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pengawasan yang memadai atas verifikasi Piutang Pajak yang disajikan dalam Neraca SKPD;
- c) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pemerintah daerah dalam pelaksanaan Jamsoskes;
- d) Memerintahkan Kepala Dinas Peternakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas hewan ternak bergulir yang telah diberikan kepada masyarakat di kabupaten/kota ;
- e) Memerintahkan Kepala BLH untuk menginstruksikan Kepala UPTB Laboratorium BLH agar melakukan penagihan kepada pihak perusahaan sebagai wajib retribusi yang lalai dalam menyetorkan penerimaan retribusi secara tepat waktu.

### **3) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Sumsel. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4  
 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-  
 undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
 Tahun 2012 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Kontribusi atas kerjasama bangun guna serah pembangunan	Kontribusi atas kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Gedung Olah Raga belum diterima sebesar 87.600.000
2. Perjalanan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Terdapat perjalanan dinas pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar 30.469.300
3. Kesalahan penganggaran Belanja Modal	Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Biro Umum dan Perlengkapan sebesar 3.884.819.000
4. Kegiatan pemberian paket sembako melalui pos	Kegiatan pemberian paket sembako melalui pos Belanja Subsidi sebesar 2.606.928.000 tidak sesuai ketentuan
5. Penerima dana hibah tidak dapat dikonfirmasi	Terdapat penerima dana hibah tidak dapat dikonfirmasi sebesar 1.275.000.000, tidak memiliki sekretariat tetap sebesar 3.045.000.000, dan penggunaan dana hibah tidak sesuai ketentuan sebesar 1.776.552.223
6. Penerima dana hibah tidak menyampaikan proposal dan laporan pertanggungjawaban	Terdapat penerima dana hibah tidak menyampaikan proposal dan laporan pertanggungjawaban, penggunaan dana hibah tidak sesuai ketentuan sebesar 36.000.000,00, dan belum dipertanggungjawabkan sebesar 6.510.222.168,00
7. Pekerjaan pada kegiatan belanja modal	Pekerjaan pada kegiatan belanja modal lima SKPD kurang volume sebesar 3.224.692.813

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku III tahun 2012

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

- a) Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset dan Kepala Sub Bidang Pendapatan untuk melakukan penagihan atas kontribusi kerjasama BSG pembangunan kawasan GOR sebesar Rp87.600.000
- b) Memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan PPK dan Bendahara Pengeluaran Biro Umum dan Perlengkapan lebih cermat dalam meneliti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas;
- c) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan lebih cermat dalam merealisasikan belanja modal;
- d) Memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menginstruksikan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri untuk menyalurkan paket sembako dan menyetorkan hasil penjualan paket sembako;
- e) Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan pengawasan atas evaluasi dan verifikasi proposal permintaan bantuan dana hibah ;
- f) Kepala BPKAD dan Kepala Badan Kesejahteraan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk lebih cermat

mengusulkan realisasi belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta/kelompok masyarakat;

- g) Memerintahkan Kepala Dinas PU BM, Kepala Dinas PU CK, Kepala Disdik, Kepala Dinkes, dan Kepala Disbudpar menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.142.856.825

**b. Opini Wajar dengan Pengecualian tahun 2013**

**1) Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sumsel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 terdapat temuan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) seperti yang dapat dilihat pada tabel IV.5 :

Tabel IV.5  
 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Sumatera Selatan  
 Tahun 2013 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Realisasi belanja hibah per 31 Desember 2013 yang belum dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar 2.031.305.991.844	a. Terdapat belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 253.000.702.391 b. Kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 232.328.030.000 c. Kepada pihak ketiga lainnya sebesar 336.610.829.525 d. Nilai hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar 821.939.561.916
2. Saldo piutang pajak daerah yang merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2013 sebesar 246.551.105.915 tidak diyakini kewajarannya	a. Nilai tunggakan yang berasal dari piutang PKB TA 2012 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 110.376.638.550 diragukan kewajarannya
3. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar 899.926.801.443 diragukan kewajarannya	a. Terdapat aset lain-lain sebesar 652.969.043.639 yang tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku I tahun 2013

Berdasarkan poin dua pada tabel diatas dalam laporan neraca atas laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaporkan saldo Piutang Pajak Daerah yang merupakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2013 sebesar Rp246.551.105.915. Diantara saldo tersebut, nilai sebesar Rp110.376.638.550 merupakan nilai tunggakan yang berasal dari piutang PKB TA 2012 dan tahun-tahun sebelumnya. Nilai ini disajikan dengan menggunakan data piutang posisi per Agustus



2013, sehingga belum memperhitungkan transaksi piutang per posisi 1 September sampai dengan 31 Desember 2013. BPK tidak dapat melakukan prosedur untuk meyakini nilai tunggakan TA 2012 dan tahun-tahun sebelumnya per posisi 31 Desember 2013, sehingga nilai Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2013 yang disajikan, diantaranya sebesar Rp110.376.638.550 diragukan kewajarannya.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian piutang pajak daerah dan aset lainlain yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta belum dipertanggungjawabkannya belanja hibah, laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **2) Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan BPK, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6  
Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan  
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2013 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Piutang tunggakan pajak kendaraan bermotor	Piutang tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor TA 2012 sebesar 110.376.638.550 tidak diyakini kewajarannya
2. Penyajian piutang dan hutang jamsoskes	Penyajian Piutang dan Utang Jamsoskes masing-masing sebesar 43.782.849.297 dan 4.958.093.960 belum didasarkan pada hasil rekonsiliasi dengan kabupaten/kota
3. Pencatatan nilai investasi	Pencatatan nilai Investasi Non Permanen Hewan Ternak Bergulir belum tertib sebesar 4.241.700.000
4. Aset Lainnya berupa aset rusak berat pada Dinas Pendidikan	Aset Lainnya berupa aset rusak berat pada Dinas Pendidikan sebesar 652.969.043.639 tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku II tahun 2013

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

- a) Memerintahkan Kepala Dispenda untuk berkoordinasi dengan Inspektorat dalam melakukan reuiu atas kelemahan sistem aplikasi Samsat yang digunakan pada masing-masing UPTD Dispenda dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan;
- b) Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Kepala Bidang Jaminan Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamsoskes untuk melakukan rekonsiliasi piutang dan utang Jamsoskes Sumsel Semesta secara reguler dengan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
- c) Memerintahkan Kepala Dinas Peternakan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas Investasi Non Permanen berupa hewan ternak bergulir yang diberikan kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- d) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan serta Penyimpan Barang agar melakukan inventarisasi fisik dan melengkapi dokumen aset lain-lain berupa aset yang dihibahkan kepada pihak lain dan aset dalam kondisi rusak berat.

### **3) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan menemukan adanya ketidakpatuhan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7  
 Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-  
 undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
 Tahun 2013 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Kesalahan penganggaran belanja daerah	Kesalahan penganggaran belanja daerah pada dua SKPD sebesar 11.903.791.000
2. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan	Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan pada RS dr. Ernaldi Bahar terlambat disetorkan sebesar 34.884.480 dan digunakan langsung sebesar 330.924.520
3. Lima paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga	Lima paket pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Bina Marga terlambat diselesaikan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar 2.253.217.352
4. Pelaksanaan 47 kegiatan belanja modal	Pelaksanaan 47 kegiatan Belanja Modal pada delapan SKPD kurang volume sebesar 2.641.410.454
5. Penggunaan dana hibah oleh Panitia Daerah <i>Islamic Solidarity Games</i>	Penggunaan dana hibah oleh Panitia Daerah <i>Islamic Solidarity Games</i> belum dipertanggungjawabkan sebesar 3.090.000.000 dan kelebihan nilai kontrak pekerjaan <i>Pre Show dan Show Opening – Closing ISG III 2013</i> di Sumatera Selatan sebesar 118.097.000
6. Pelaksanaan 15 Kegiatan <i>Islamic Solidarity Games</i> pada BPKAD dan Dinas PU Cipta Karya kurang volume	Pelaksanaan 15 Kegiatan <i>Islamic Solidarity Games</i> pada BPKAD dan Dinas PU Cipta Karya kurang volume sebesar 1.223.782.898
7. Realisasi Belanja Hibah	Realisasi Belanja Hibah sebesar 821.939.561.916 belum dipertanggungjawabkan.

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku III tahun 2013

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

- a) Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU CK agar lebih cermat dalam menganggarkan belanja sesuai jenisnya
- b) Memerintahkan Direktur RS dr. Ernaldi Bahar untuk mematuhi peraturan yang berlaku atas pengelolaan pendapatan daerah
- c) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Bina Marga untuk menarik denda keterlambatan dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp192.850.185
- d) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.619.263.287 dan memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar sebesar Rp630.108.292

- e) Memerintahkan Ketua dan Bendahara Panitia Daerah ISG untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp3.090.000.000
- f) Memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala Dinas PU Cipta Karya untuk menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp674.144.449 atas pelaksanaan pekerjaan pada BPKAD dan memotong pembayaran retensi atas potensi kelebihan atau menarik kelebihan pembayaran dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp146.410.159 atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PU Cipta Karya
- g) Memerintahkan Kepala BPKAD untuk memerintahkan kepada Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta para penerima hibah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.

Berdasarkan temuan-temuan dan kelemahan atas pemeriksaan laporan keuangan daerah Pemprov Sumsel tersebut BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian untuk LKPD Pemprov Sumsel tahun anggaran 2012 dan 2013. Opini WDP ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemprov Sumsel belum dapat memenuhi karakteristik kualitatif pada poin andal yang merupakan syarat normatif untuk memenuhi kualitas informasi yang disajikan, terbukti dengan

masih banyak informasi yang disajikan tidak dapat diyakini kebenarannya tidak dapat diverifikasi dan juga masih terdapat ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

**c. Opini Wajar tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan  
2014**

**1) Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Pemprov Sumsel**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar



memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, BPK menyatakan opini kecuali untuk dampak penyajian piutang pajak daerah dan aset lainlain yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta belum dipertanggungjawabkannya belanja hibah, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah

melakukan upaya perbaikan atas realisasi dan penyajian belanja hibah, piutang pajak daerah dan aset lainlain sehingga walaupun masih terdapat permasalahan sehubungan pertanggungjawaban belanja hibah, piutang pajak daerah dan pengelolaan aset lainlain, penyajian belanja hibah, piutang pajak daerah dan aset lainlain telah wajar.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam catatan atas laporan keuangan butir atas Neraca tercatat piutang pajak daerah berupa Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (PKB BBNKB) sebesar Rp513.284.045.745. Saldo tersebut merupakan perhitungan piutang pajak, denda beserta bunga atas tunggakan wajib pajak yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Samsat berdasarkan data wajib pajak yang menunggak per 31 Desember 2014 dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berlaku untuk tahun yang bersangkutan. Pengujian atas penggunaan Sistem Aplikasi Samsat mengetahui bahwa sistem aplikasi tersebut tidak memiliki fitur yang dapat

memisahkan antara NJKB terbaru dengan NJKB sebelumnya ketika terjadi perubahan. NJKB setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai hal tersebut. Setelah dilakukan penghitungan secara manual, walaupun masih terdapat permasalahan namun dampaknya tidak berpengaruh secara signifikan atas kewajaran penyajian nilai piutang. Kelemahan yang terjadi atas Sistem Aplikasi Samsat tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya kesalahan yang dapat mempengaruhi penyajian piutang pada masa mendatang. Untuk mendapatkan keyakinan lebih dalam memberikan opini BPK juga melakukan pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas laporan keuangan.

## **2) Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern**

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditemukan BPK, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.8  
 Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penyusunan  
 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
 Tahun 2014 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Piutang pajak kendaraan bermotor	Pencatatan atas Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Belum Memadai sebesar 504.742.129.580
2. Pencatatan nilai investasi	Pencatatan Nilai Investasi Non Permanen - Hewan Ternak Bergulir Belum Tertib
3. Administrasi SP2D tidak tertib	Administrasi SP2D tidak tertib, penerbitan SP2D LS bukan gaji sebesar 63.856.531.702 terlambat, dan penyampaian surat perintah membayar (SPM) LS akhir tahun sebesar 154.895.951.912 terlambat
4. Pengendalian atas Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)	Pengendalian atas Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar 2.939.406.550 dan penyampaian pertanggungjawaban TUP senilai 23.032.902.891 belum sepenuhnya memadai
5. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang	Kesalahan penganggaran pada Belanja Modal dan Belanja Barang di tiga SKPD sebesar 89.214.531.626

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku II tahun 2014

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

- a) Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pengawasan atas verifikasi Piutang PKB yang disajikan dalam Neraca SKPD dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan perbaikan pada Sistem Aplikasi Samsat;
- b) Memerintahkan Kepala Dinas Peternakan untuk melakukan inventarisasi dan monitoring atas jumlah ternak bergulir secara berkala;
- c) Kepala BPKAD selaku BUD untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan SP2D dan memberikan sanksi kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan BPKAD atas kelalaiannya dalam mengelola administrasi SP2D yang dibatalkan;
- d) Memerintahkan Bendahara Umum Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan SPP, SPM dan SP2D;
- e) Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkoordinasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar lebih cermat dalam menganggarkan Belanja

Transfer/Bagi Hasil Pajak ke kabupaten/kota se-Sumatera Selatan;

- f) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait proses penyusunan anggaran dengan melibatkan seluruh SKPD

### **3) Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidak patuhan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.9  
Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2014 (Dalam Rupiah)

Hasil Temuan	Keterangan
1. Pengelolaan Retribusi	Pengelolaan Retribusi di kawasan <i>Jakabaring Sport City (JSC)</i> Belum Sesuai Ketentuan
2. Alokasi Belanja Modal	Alokasi belanja modal pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum sesuai ketentuan
3. Belanja Honorarium	Belanja honorarium di luar tunjangan penghasilan pegawai sebesar 135.395.000 tidak sesuai ketentuan
4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar 79.284.392 tidak sesuai dengan ketentuan
5. Belanja Premi Asuransi	Belanja premi asuransi kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
6. Realisasi Pengadaan Alat <i>Tablet</i> Pada Dinas Pendidikan	Realisasi pengadaan alat <i>tablet</i> pada dinas pendidikan sebanyak 16 unit senilai 71.920.000 tidak sesuai peruntukkan
7. Terdapat 31 paket pekerjaan kurang volume	Terdapat 31 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Peternakan, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kurang volume sebesar 7.108.749.695.
8. Belanja hibah belum dipertanggungjawabkan	Belanja hibah sebesar 18.406.431.878 belum dipertanggungjawabkan dan terdapat pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan secara terus menerus.

Sumber: Laporan hasil pemeriksaan BPK buku III tahun 2014

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, antara lain agar:

1. Mengusulkan penerbitan peraturan daerah kepada DPRD yang mengatur tentang retribusi atas pintu masuk, pedagang kaki lima dan permainan rekreasi danau di kawasan *Jakabaring Sport City*;
2. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih cermat dalam melakukan penyusunan Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Kepala SKPD untuk lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja honorarium dan meningkatkan pengawasan atas realisasi belanja honorarium;
4. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA dan PPTK Sekretariat Daerah dan Kebudayaan dan Pariwisata karena lemah dalam melakukan pengendalian atas perjalanan dinas luar daerah;
5. Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan karena kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas asuransi kendaraan dinas;



perubahan. NJKB setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai hal tersebut, walaupun masih terdapat permasalahan namun dampaknya tidak berpengaruh secara signifikan atas kewajaran penyajian nilai piutang akan tetapi dapat berpengaruh dalam penyajian piutang dimasa yang akan datang.

Dengan meningkatnya opini dari WDP menjadi WTP-DPP hal ini dapat diindikasikan bahwa Pemprov Sumsel telah berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh BPK pada setiap tahun pemeriksaan sebelumnya dan telah memenuhi karakteristik kualitas informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat untuk mencapai predikat *good governance*. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan berperan penting bagi pemakai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena dengan begitu para pengguna informasi laporan keuangan dapat mengetahui kelemahan apa saja yang harus diperbaiki untuk kedepannya,

bagaimana pengumpulan sumber daya dan penggunaannya, dan dapat melihat akuntabilitas atas pengelolaan keuangan tersebut. Opini yang baik juga dapat menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat mempengaruhi pembangunan suatu daerah, selain itu juga dapat mengindikasikan bahwa dalam pemerintahan tersebut sistem birokrasi telah berjalan dengan baik. Berdasarkan opini yang didapatkan oleh pemprov Sumsel pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yaitu WDP dan WTP-DPP, maka variabel opini tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP) tidak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad (2014) dan Desi (2012) bahwa opini yang baik menunjukkan kualitas informasi laporan keuangan telah terpenuhi dan laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat untuk mencapai predikat *good governance*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah dan Bestari (2015) bahwa sistem pengendalian intern diterapkan untuk mencapai sasaran dan menjamin untuk menyediakan laporan keuangan yang handal serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini yang baik dapat mempengaruhi pembangunan dan juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, opini yang diberikan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu WDP sejalan dengan kualitas informasi LKPD pemprov Sumsel pada tahun tersebut belum terpenuhi karena belum memenuhi karakteristik andal sebagai salah satu dari empat unsur syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Setelah melakukan perbaikan yang telah direkomendasikan oleh BPK atas pemeriksaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya, opini yang didapatkan oleh pemprov Sumsel yaitu WTP-DPP sejalan dengan hasil pemeriksaan dan opini yang didapat dalam LKPD tahun 2014 kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif yang perlu diwujudkan untuk memenuhi tujuannya.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran yaitu:

- 1) Sebaiknya pemprov Sumsel untuk lebih mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan opini dari WTP-DPP menjadi WTP.

- 2) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sama, sebaiknya menambahkan variabel lain seperti *good governance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hafidzan Azhani dan Dwi Martani. 2014. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik Dan Ketidakpatuhan Regulasi Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA 17 Mataram lombok, Universitas Mataram 24-27 September 2014*, (<http://e-prints./2946>, diakses pada tanggal 07 November 2015).
- Arens, Alvin A; Mark S Beasley dan Randal J Elder. (2013). *Jasa Audit dan Assurance*. Alih Bahasa Desi Fitriani. 2013. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bahtiar Arif; Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Akademis.
- Biana Adha Inapty; M Ali Fikri dan RP Sri Pancawati Martiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peranan Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. *SNA 18 Medan, Universitas Sumatera Utara 16-19 September 2015*, ([www.pps.unud.ac.id/e-journal](http://www.pps.unud.ac.id/e-journal), diakses pada tanggal 07 November 2015).
- Deddi Nordiawan; Iswahyudi Sondi Putra dan Maulida Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Desi Handayani, 2012. Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.5, Desember 2012, 12-16*, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>, diakses pada tanggal 07 november 2015).
- Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 7 No 2 september 2015*, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>, diakses pada tanggal 07 november 2015).
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Semarang: Penerbit Erlangga.
- Kennedy, Putri Wulandari dan Enni Savitri. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian internal, dan Teknologi informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan pada SKPD Provinsi Riau. *JOM FEKON*

*Vol. 1 No. 2 Oktober 2014*, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>, diakses pada tanggal 07 november 2015).

- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Pers Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2009. *Metode Riset Ekonomi & Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. 2002. *Auditing Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Sa'adah Siddik, Dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sofyan Safri Harahap. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Bandung: Alfabeta.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137

Palembang, 5 Februari 2016

Nomor : 05 /S/XVIII.PLG.1/2/2016  
Perihal : Konfirmasi Permohonan Ijin Penelitian

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang  
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu  
Palembang**

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor 1870/H-5/FEB-UMP/I/2016, tanggal 26 Januari 2016, perihal Mohon Izin Penelitian, atas nama:

Nama : Halima Tusa'Diyah  
NIM : 22 2012 435  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Penelitian : **"Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Opini Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan"**.

dengan ini kami sampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dimaksud pada kisaran waktu bulan Februari 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**Kepala Sekretariat Perwakilan,**



**Roosana Amiranti  
NIP 196403241994032001**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


### KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Halima Tusa'Diyah	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 040	KETUA : DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : <b>Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas Opini Yang Dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan</b>	

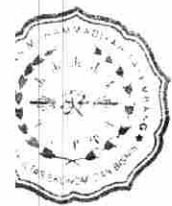
NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	15/2/2016	Bab 1	<i>ps</i>		Perbaiki
2					
3	18/2/2016	Bab 2	<i>ps</i>		Terdapat kekusutan dg kebut. pembalasan
4					metode & susunlah
5	18/2/2016	Bab 3	<i>ps</i>		jenis pend. b.
6					
7	02/03/2016	Bab 4. Pembahasan	<i>ps</i>		Tidak harus menajap ke masing variabel kinita
8					informasi k, ttp dtkr
9					bab pembahasannya dengan opini
10	05/2/2016	Bab 1 & 5	<i>ps</i>		Perbaiki lagi.
11		Daftar Isi, Abstrak dll			
12					
13	11/2/2016	Skripsi	<i>ps</i>		Acc ujian
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang  
 Pada tanggal : 11 / 03 / 2016  
 a.n. Dekan  
 Program Studi :  
  
 Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI  
 INSTITUSI PERGURUAN TINGGI  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)  
 Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)  
 Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Website: [umpalembang.net/feump](http://umpalembang.net/feump)

Email : [feumplg@gmail.com](mailto:feumplg@gmail.com)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Senin, 21 Maret 2016  
 Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB  
 Nama : Halima Tusa'diyah  
 NIM : 22 2012 040  
 Program Studi : Akuntansi  
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
 Judul Skripsi : KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN ATAS OPINI YANG  
 DIKELUARKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN  
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA	Pembimbing	8 April 2016	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji	8 April 2016	
3	Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji I	29/3 - 2016.	
4	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji II	29/3 - 2016	

Palembang, Maret 2016

Dekan,  
 u.b Ketua Program Studi Akuntansi



**Rosalina Ghozali, SE, Ak, M.Si**  
 NIDN/NBM : 0228115802/1021960

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

*Unggul dan Islami*

Secretariat

484/J-10/FEB-UJP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

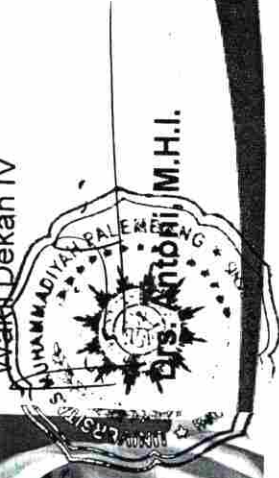
NAMA : HALIMA TUSA'DIYAH  
NIM : 222012040  
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma  
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 12 September 2015  
an. Dekan



Wakil Dekan IV





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Halima Tusa Diyah  
 Place/Date of Birth : Lubuklinggau, January 16th 1995  
 Test Times Taken : +2  
 Test Date : February, 4th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 54  
 Structure Grammar : 45  
 Reading Comprehension : 41  
 OVERALL SCORE : 467

Palembang, February, 11th 2016

Head of Language Institute

HMA Agus Susanti, S.Pd., M.A  
Ukr. Bahasa Inggris Palembang

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 106/TEA FELLB/UMP/II/2016

Center Dates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
STATUS TERAKREDITASI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

**U M PA**

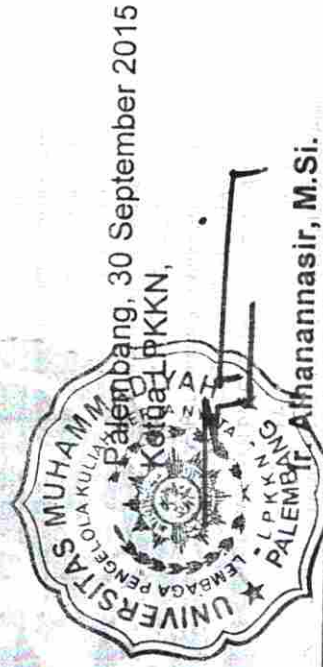
No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : HALIMA TUSA'DIYAH  
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012040  
Fakultas : EKONOMI  
Tempat Tgl. Lahir : LUBUKLINGGAU, 16-01-1995  
telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:  
Kelurahan/Desa : Tanjung Rancing  
Kecamatan : Kayuagung  
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir  
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui  
Rektor,

REKTOR Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



## BIODATA PENULIS

Nama : Halima Tusa'Diyah  
NIM : 22 2012 040  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 16 januari 1995  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Kgs Abdurrahman Rt. 07 No.70 Kel.  
Tabapingin Kec. Lubuklinggau Selatan II  
Kota Lubuklinggau  
No. Handphone : 089627173111  
Email : Diyahlatif16@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Bapak : A. Latif  
Ibu : Anik Khutsiyah  
Pekerjaan Orang Tua  
Bapak : -  
Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Jl. Kgs Abdurrahman Rt. 07 No. 70 Kel.  
Tabapingin Kec. Lubuklinggau Selatan II  
Kota Lubuklinggau

Palembang, 03 Maret 2016

Penulis

Halima Tusa'Diyah